



DPRD-Pemprov DKI Upayakan APBD 2015

Fokus Pembahasan Kegiatan Yang Dicoret Kemendagri

GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak akan memberi toleransi, anak buahnya yang terbukti bermain-main dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika ada PNS yang nyata-nyata mengakali anggaran, dia mengancam bawahannya itu tidak hanya distafkan namun juga dinonaktifkan.

"Jadi dari Rp 12,1 triliun ternyata ada Rp 2 triliun yang udah masuk di RAPBD 2015. Saya lagi nyisir. Begitu ketahuan siapa yang tanggung jawab, SKPD mana akan langsung saya tindak," ujar Basuki, kemarin (18/3). Pejabat yang akrab disapa Ahok itu juga mengaku merasa terbantu dengan adanya situs *kawalapbd.org* yang dibuat Ainun Najib.

Sehingga masyarakat bisa mengetahui anggaran-anggaran yang janggal dalam APBD DKI Jakarta 2015. Ahok pun tak segan-segan akan menonaktifkan PNS yang terbukti masih bermain anggaran. "Kita stafkan atau nonaktifkan. Ada macam-macam di anggaran APBD 2015 sebesar Rp 2 triliun itu. Pemeliharaan, UPS juga ada," ungkapnya juga.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengaku, sudah meminta Inspektorat Provinsi DKI untuk mengaudit anggaran yang diajukan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. "Kami pengen tahu siapa saja yang nyuruh masukan input (anggaran titipan). Dulu kan mereka (Pemprov DKI dan DPRD) enggak pernah mau jawab pertanyaan saya tuh soal siapa yang hilangnya anggaran truk sampah. Semua orang bilang enggak tahu," cetusnya juga ■

Dengan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat DKI terkait penginputan anggaran 'siluman' Rp 2 triliun pada APBD DKI 2015 dalam e-Budgeting, Ahok mengaku akan ketahuan. "Pasti ketahuan siapa yang nyuruh (memasukkan input data anggaran titipan)? Siapa yang ngetik anggaran? Sudah ketahuan semua," kata Basuki juga.

Menindaklanjuti perintah Ahok, Inspektorat Provinsi DKI langsung melaku-

kukan pemeriksaan serta audit terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Selasa (17/3) lalu. Informasi yang beredar di kalangan wartawan, Inspektorat Provinsi DKI telah memeriksa mantan pegawai Bappeda DKI yang diduga memasukkan input data serta meloloskan anggaran 'siluman'.

Pegawai berinisial WW, itu sebelumnya menjabat Kepala Bidang Program dan Pembiayaan Bappeda DKI saat dipimpin oleh Sarwo Handayani dan Andi Baso Mappapoleonro.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun, menegaskan, pihaknya terus melakukan investigasi terkait dugaan adanya PNS yang terlibat permainan anggaran. Hasilnya segera dilaporkan kepada gubernur untuk dilanjutkan mengambil keputusan selanjutnya.

"Kita terus lakukan pemeriksaan," tandasnya. (wok)